

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2001, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan rekan, Jakarta.
- Alatas, Syed Hussain, 1997, *Korupsi Sifat, Sebab, dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta.
- Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus di luar KUHP*. Raih Aksa Sukses, Jakarta.
- Alwi, Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Amir, Chaerul, 2014, *Kejaksaan Memberantas Korupsi*, Deleader, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Ananta, Semarang.
- Azhary, Muhammad Tahir, 2012, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bonger, W.A, 1981, *.Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chaeruddin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Jakarta.
- Ermansjah, , 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Grafika, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan R I: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mochtar, M. Akil, 2006 *Memberantas Korupsi, Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Husein, Harun M., 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.



Kiltgaard, Robert, dkk., *Penuntutan Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Kristiana, Yudi, 2009, *Menuju Kejaksaan Progresif : Studi Tentang Penyelidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Masyarakat Transparansi Indonesia bekerjasama dengan National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta

Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Margono, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

Mulyadi, Lilik, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Penyusun, Tim, 2002, *Kamus Pusat Bahasa Indonesia KBBI*, Balai Pustaka, Jakarta.

Pope, Jeremy, 2003, *Bentuk, Sifat dan Anatomi Korupsi*, Citra Aditya, Bandung.

Prakoso, Djoko, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta..

J.E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Silalahi, 1997, *Tak Perlu Dibentuk Badan Anti Korupsi*, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Wiyono, R., 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)



Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874)

Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4960)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organizations Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4960)

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5249)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-X-361/C/11/2010 tanggal 25 November 2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi yang merupakan revisi dari Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-X-308/C/10/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi.

Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-009/A/JA/1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pusat Pemulihan Aset

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset.



Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor Prin-021/C/Cu.3/02/2011 pada tanggal 18 Februari 2011.

Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor Prin-170/C/Cu.3/09/2011 tanggal 23 September 2011.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, dan Internet

Arief, Valdy, “Kejaksaan Terus Telusuri Aset Yayasan Supersemar”, <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/02/02/kejaksanaan-terus-telusuri-aset-yayasan-supersemar-hingga-rp-44-triliun?page=2>, diakses pada tanggal 3 Mei 2016

Harefa, Beniharmoni, 2011, “Upaya Pengembalian Aset (Aset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri”, *Tesis*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Chandra M. Hamzah, 2011 “Diskusi Meja Bundar Permasalahan Pengembalian Aset”, *makalah*, UNODC, Jakarta, hlm, 18.

Imbar, Maggie Regina, 2015, “Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery dalam tindak pidana pencucian uang”, *skripsi*, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Istman MP, et al, “Kejaksaan Agung Paling Korup”, <http://www.tempo.co/read/fokus/2012/07/16/2487/Kejaksaan-Agung-Paling-Korup>, diakses pada tanggal 30 Desember 2015.

Sacawisastra, Krisiandi, “Lintasi Tiga Benua, Berakhir di Tepi Karibia”, <http://www.antikorupsi.org/id/content/lintasi-tiga-benua-berakhir-di-tepi-karibia>, diakses pada tanggal 30 April 2016

Lolo, Ferdinand T. Andi, 2014, “Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia”, *Kajian Departemen Kriminologi Universitas Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Lubis, Riani Atika Nanda, 2001, “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)”, *skripsi*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Murtiningsih, “Penjelasan Murtiningsih Jaksa Yang Dizolimi”, <http://www.justiceforchuck.com/2015/12/29/penjelasan-murtiningsih-jaksa-yang-dizolimi/> diakses pada tanggal 25 April 2016

Nambut, Bosco, “Kejaksaan Lembaga Paling Korup”, <http://requisitoire-magazine.com/kejaksanaan-lembaga-negara-paling-korup/>, diakses pada tanggal 30 Desember 2015.

Nambut, Bosco, “Prestasi”, *Requisitoire Volume 36 Tahun 2014*.



Nambut, Bosco, “Ketika Konsultan Media Membantu Jaksa Agung”, *Requisitoire Volume 36 Tahun 2014*.

Nambut, Bosco, “Siapa Kelola Aset Asian Agri”, *Requisitoire Volume 36 Tahun 2014*.

Nishirina, 2001, “Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi” : Upaya Pengembalian Kerugian Negara”, *skripsi*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Santosa, Bima Priya, et al, 2010, *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana Tertentu*, The Netherlands-Indonesia Legal Reform Program (NLRP), Jakarta.

Satrio W, Hangkoso, 2012, “Perampasan Aset Dalam Penganganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No. 1454K/Pid.Sus/2011 dengan Terdakwa Bahsyim Assifie)”, *skripsi*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Suryosumpeno, Chuck, “Asset Recovery dalam Perspektif Kejaksaan R.I.”, <http://requisitoire-magazine.com/2012/07/14/asset-recovery-dalam-perspektif-kejaksaan-r-i/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2016

Zakiah, Wasingatu, “Penegakan hukum Undang-undang Korupsi”, *Makalah*, Jakarta, 2001, hlm 23.

Zamzam, “Memburu 28 Koruptor Pasca Penangkapan Samadikun”, <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/04/22/60519//25/Memburu-28-Koruptor-Pasca-Penangkapan-Samadikun>, diakses pada tanggal 30 April 2016

“Pengertian Kejaksaan”, http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1, diakses tanggal 30 Desember 2015.

http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3, diakses tanggal 31 Desember 2015.